# **BAB V**

# **ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Pada bab ini, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Arah dan kebijakan pembangunan tahun 2025 lebih berorientasi pada titik tolak transformasi struktural ekonomi daerah. Ketergantungan Sumatera Barat terhadap sumber daya alam perlu dikurangi dengan meningkatkan daya saing industri pengolahan dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini penting dalam rangka pencapaian Visi Indonesia 2045 untuk keluar dari *middle income trap*.

Uraian dalam Bab V RKPD Tahun 2025 dibagi dua, yaitu analisis indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2022 dan 2023 serta proyeksi indikator makro kabupaten/kota tahun 2024 dan tahun 2025.

## Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan kab/kota. Capaian kinerja provinsi merupakan agregasi dari kinerja kab/kota. Semakin baik kinerja kab/kota maka semakin baik kinerja provinsi.

Pada subbab ini disajikan beberapa capaian indikator kinerja makro seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Indikator dimaksud meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Gini (Gini Ratio). Guna melihat capaian kinerja pembangunan daerah, maka disajikan data capaian tahun 2023 dan progress pencapaiannya untuk kemudian dianalisis berdasarkan wilayah yang setara dalam persentil 0,33 dan persentil 0,67 sehingga terdapat pembagian pencapaian kinerja dalam 3 wilayah.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah perlu disandingkan dengan sesama wilayah yang setara. Perwilayahan yang setara ini membagi 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat ke dalam 3 wilayah yang terdiri dari 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

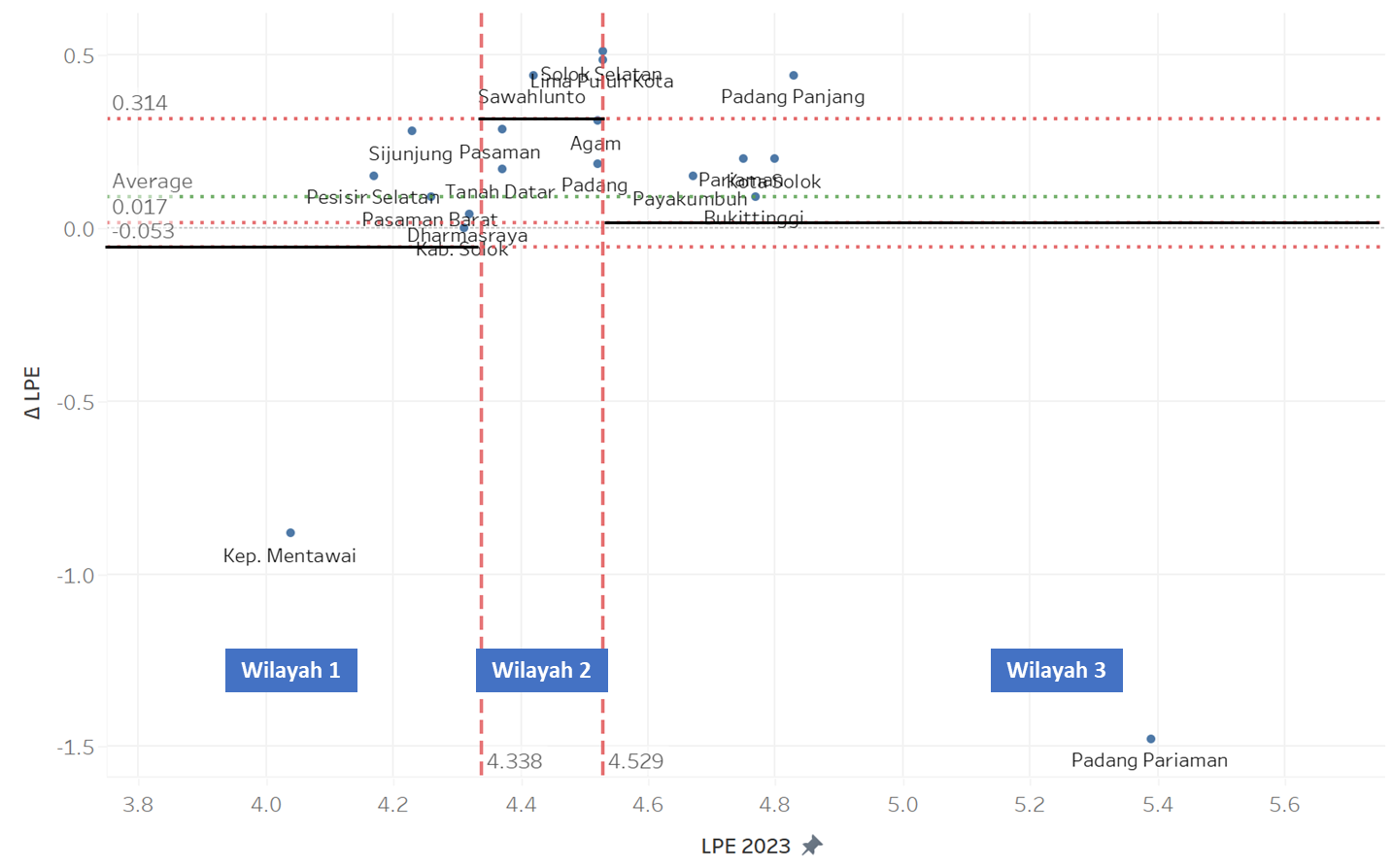
### Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten/Kota

#### **5.1.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian kinerja peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,09 persen poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-1. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.1

Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Wilayah yang Setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

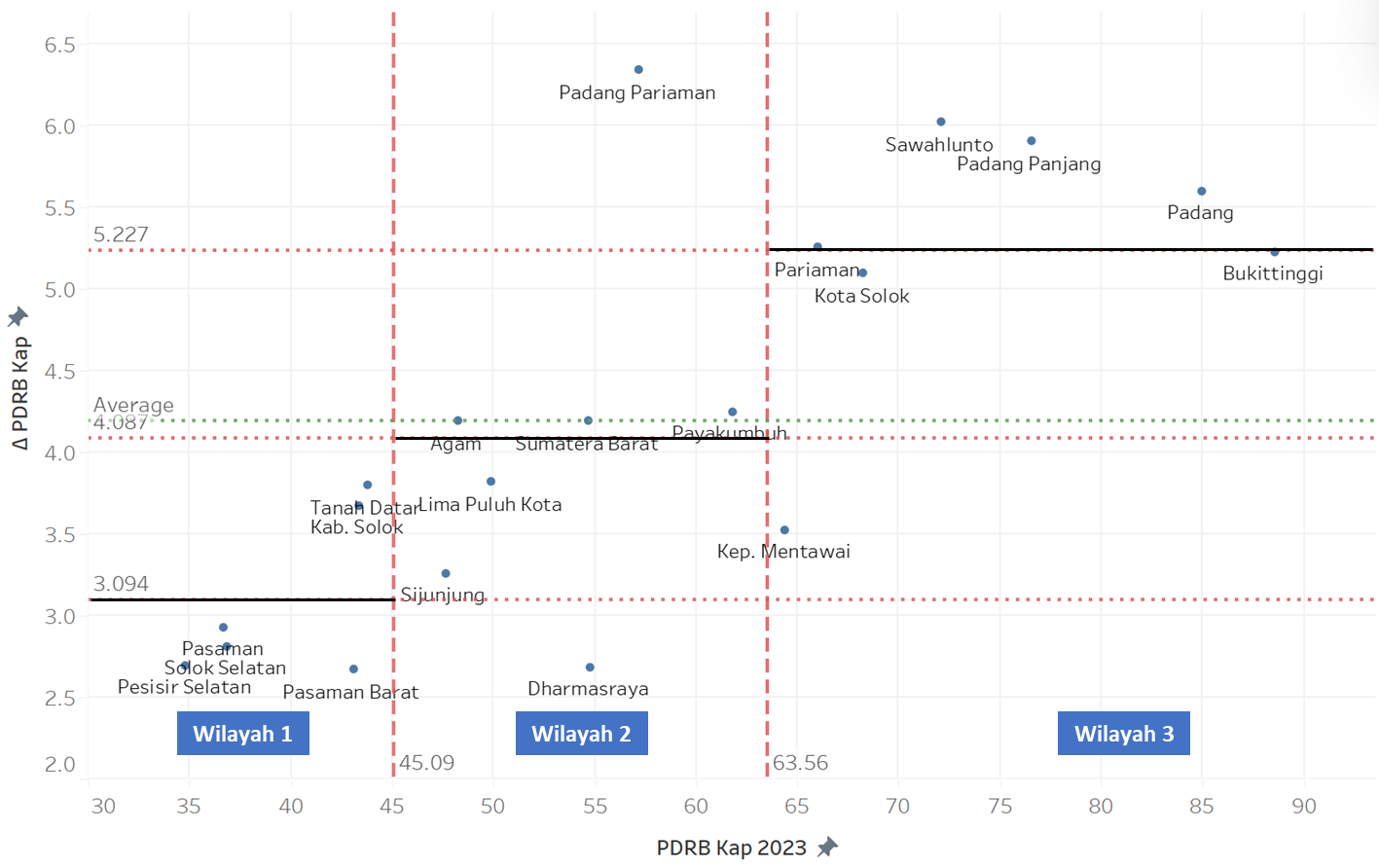
* 1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Pasaman Barat. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Kep. Mentawai.
  2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Pasaman, dan Kota Padang.
  3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Solok Selatan, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Padang Pariaman.

#### **5.1.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian PDRB per Kapita**

Pencapaian kinerja peningkatan PDRB per Kapita di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 4,19 juta yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-2. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.2

Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian PDRB per Kapita antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja kenaikan PDRB per Kapita untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

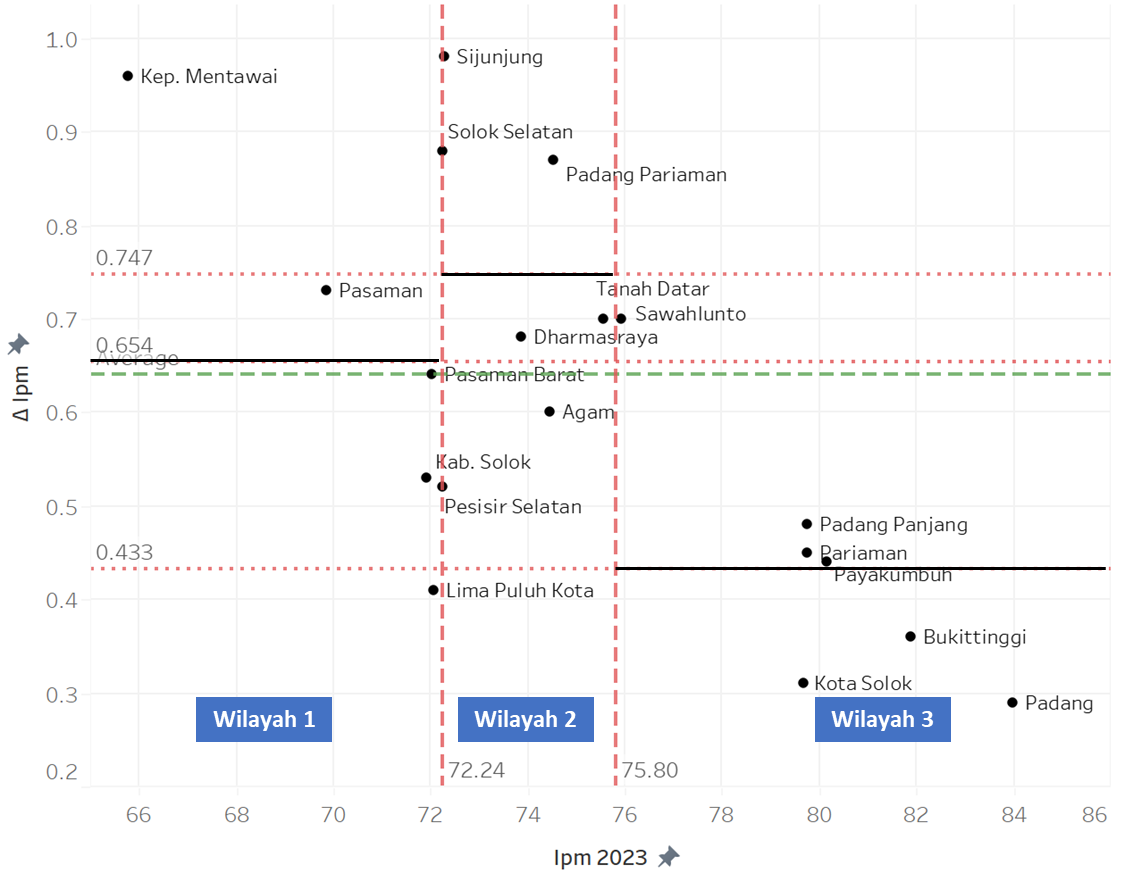
* 1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, dan Kab. Pasaman Barat
  2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Dharmasraya.
  3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi.

#### **Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia**

Pencapaian kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,61 indeks poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-3. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.3

Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja kenaikan Indeks Pembangunan Manusia untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

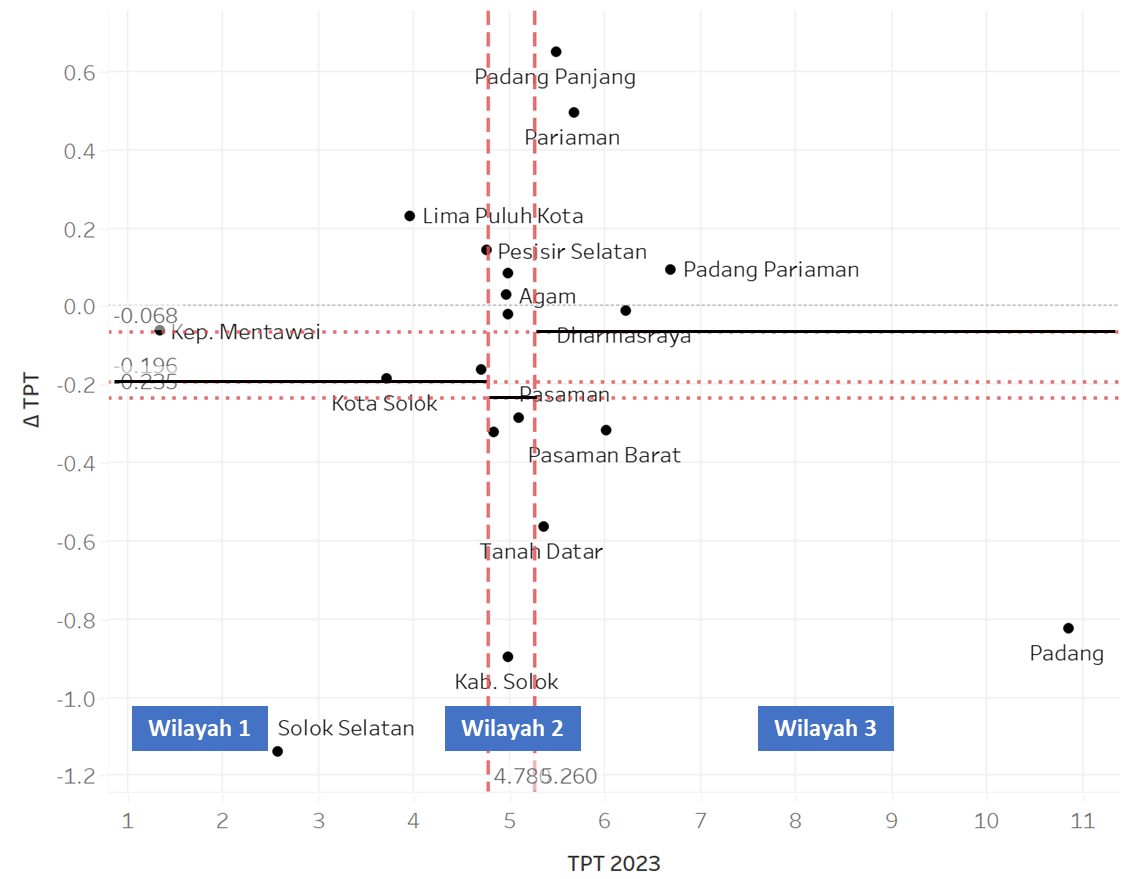
* 1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Kep. Mentawai dan Kab. Pasaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Lima Puluh Kota.
  2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, dan Kab. Dharmasraya.
  3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi.

#### **5.1.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pencapaian kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,16 persen poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-4. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.4

Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

* 1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kota Solok.
  2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Solok, Kab. Pasaman, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Agam, Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi.
  3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat, dan Kota Padang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.

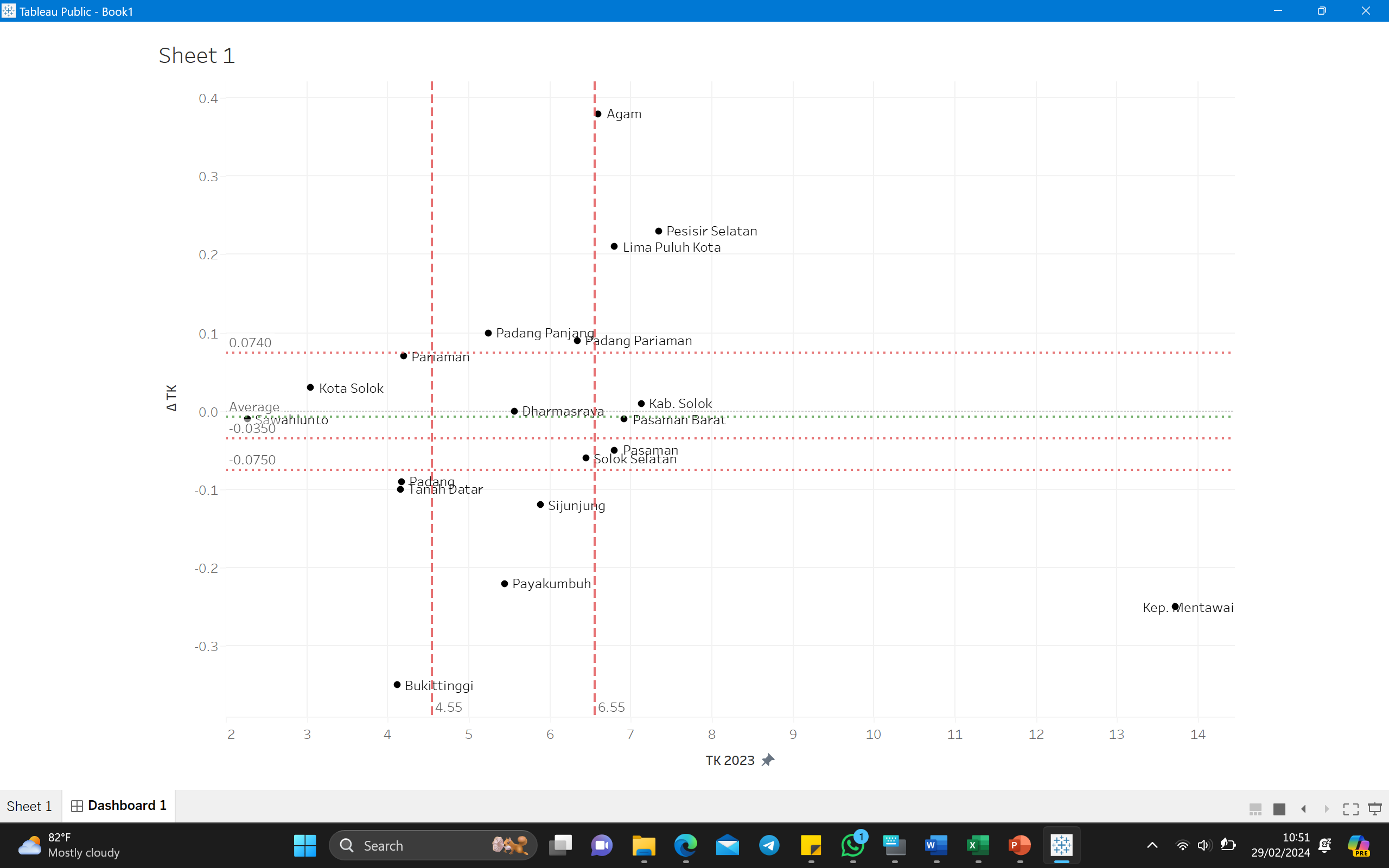
#### **5.1.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Kemiskinan**

Pencapaian kinerja penurunan Tingkat Kemiskinan di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,01 persen poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-5. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar …..

Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Tingkat Kemiskinan

antar Wilayah yang setara



**Wilayah 1**

**Wilayah 2**

**Wilayah 3**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja penurunan Tingkat Kemiskinan untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

* 1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman.
  2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, dan Kota Payakumbuh. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, dan Kota Padang Panjang.
  3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pasaman, dan Kab. Pasaman Barat. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, dan Kab. Lima Puluh Kota.

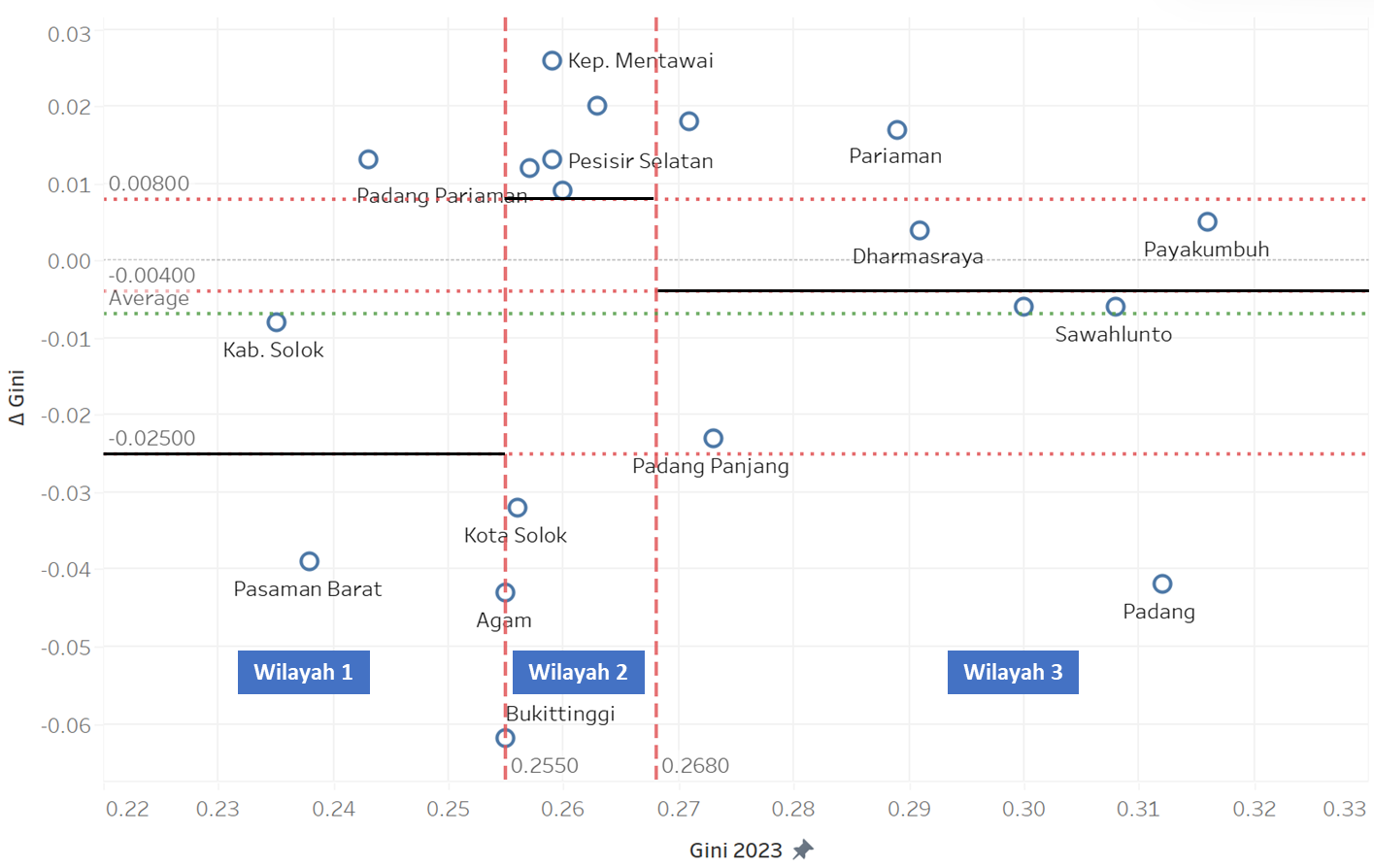
#### **5.1.1.6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Indeks Gini**

Pencapaian kinerja penurunan Rasio Gini di tahun 2023 secara rata-rata provinsi mencapai angka 0,007 indeks poin yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus pada Gambar V-6. Jika 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dibagi ke dalam 3 wilayah secara setara pada persentil 0,33 dan 0,67 akan terdapat 6 s.d. 7 kabupaten/kota yang memiliki pencapaian indikator makro yang relatif setara. Sehingga masing-masing daerah dapat melihat dan membandingkan kinerja pembangunannya dengan wilayah yang setara, tidak hanya dengan seluruh kabupaten/kota yang ada.

Gambar 5.5

Perbandingan Capaian Kinerja dan Progres Pencapaian Rasio Gini

antar Wilayah yang setara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Perbandingan capaian kinerja penurunan Rasio Gini untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

* 1. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 1 adalah Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, dan Kab. Pasaman.
  2. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kota Solok. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 2 adalah Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Padang Pariaman.
  3. Kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang Panjang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di bawah rata-rata pencapaian di wilayah 3 adalah Kab. Solok Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

### Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Pada subbab ini disajikan beberapa capaian indikator kinerja makro seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Indikator dimaksud meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini (Gini Ratio). Guna melihat kemajuan dan kualitas pembangunan ekonomi daerah, maka disajikan data capaian tahun 2022 dan 2023 untuk kemudian dianalisis berdasarkan kuadran pencapaian kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

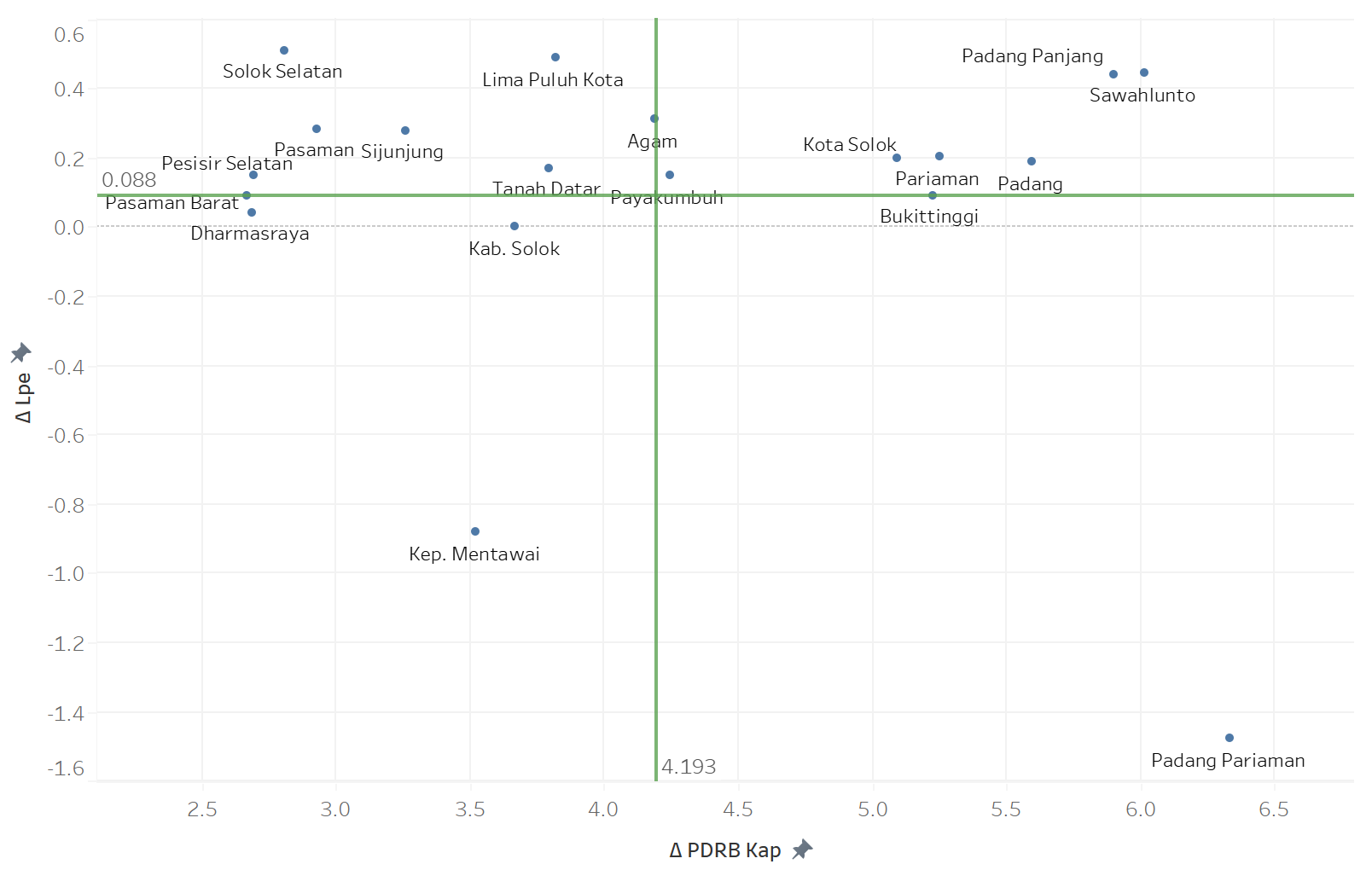
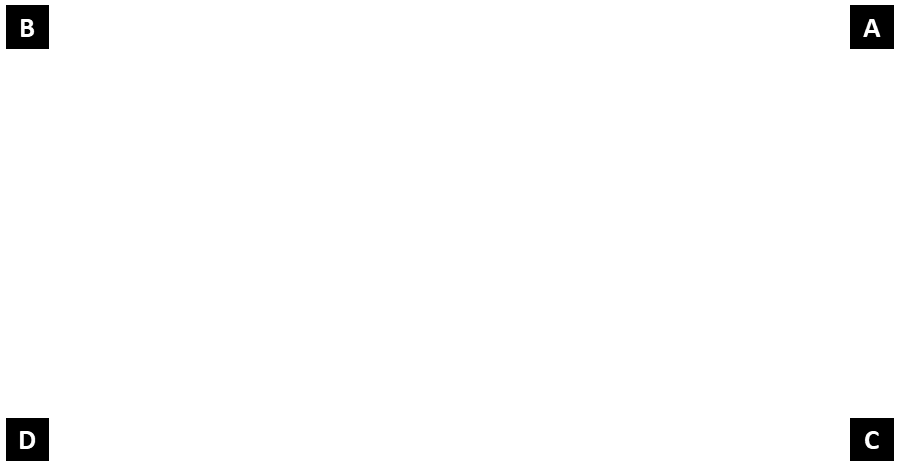
Kualitas pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan atau Rasio Gini. Pemulihan ekonomi akibat Pandemi yang terjadi sepanjang tahun 2020-2022 dan pasca COVID-19 menghasilkan efek berbeda-beda di masing-masing kabupaten/kota yang ditunjukkan oleh perbedaan pencapaian untuk setiap indikator, ada yang berada diatas rata-rata provinsi dan ada yang berada dibawah rata-rata provinsi.

#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pendapatan per Kapita**

Kinerja perekonomian kabupaten/kota tercermin dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Peranan kinerja perekonomian di setiap kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Sumatera Barat, baik dari sisi sektor lapangan usaha maupun pertumbuhannya. Pada tahun 2023, perekonomian kabupaten/kota menunjukkan kinerja relatif membaik sejak pandemi COVID-19 dimana hampir semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi posisif di tahun 2023, jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini juga berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat yang ikut naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Gambar 5.6

Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

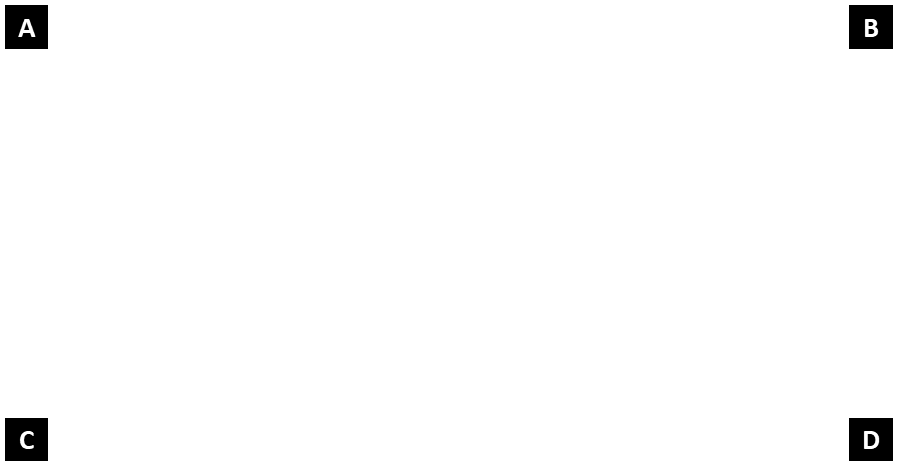
Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian PDRB per kapita terlihat pada gambar V-7. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

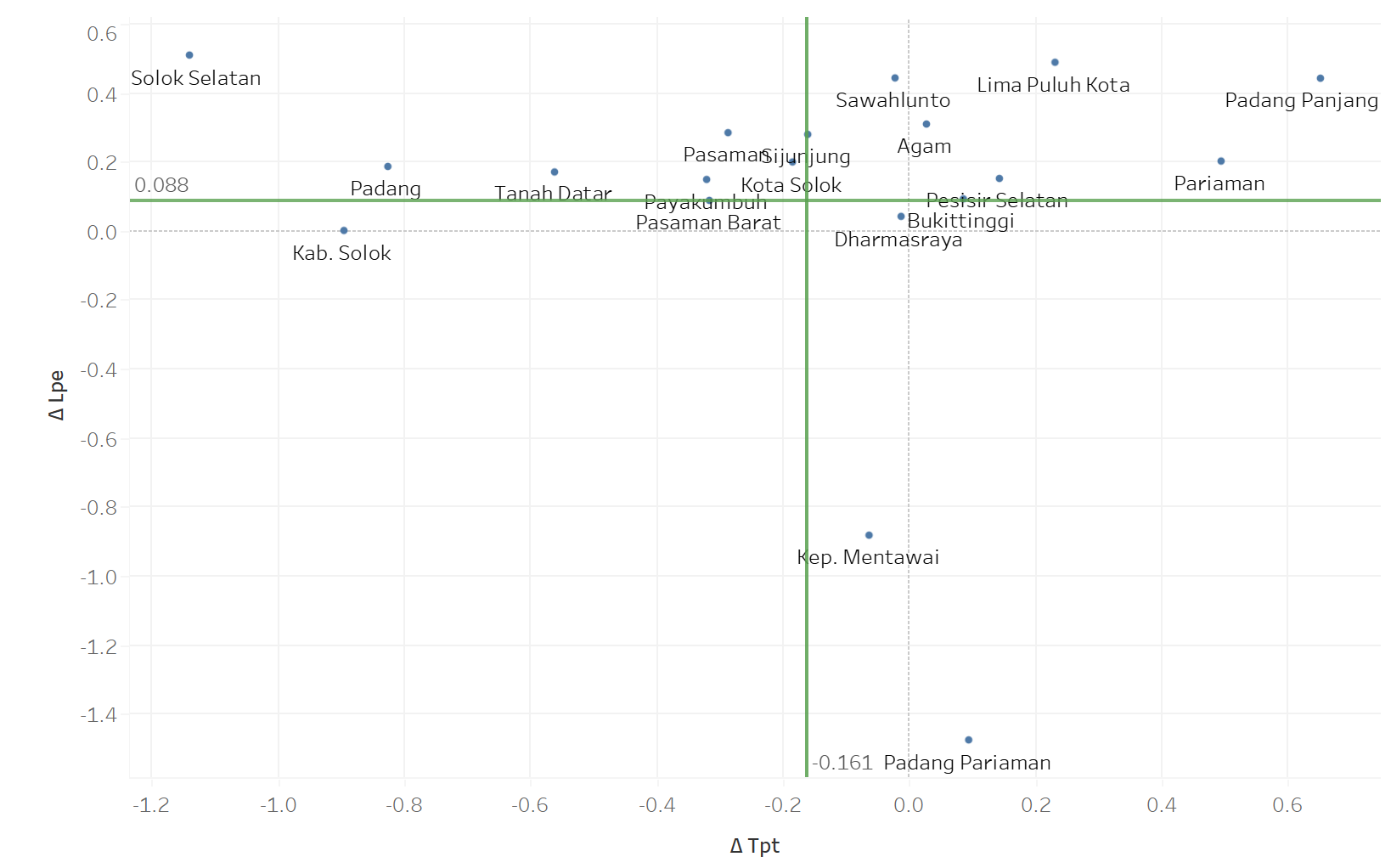
1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan peningkatan PDRB per kapita di atas rata-rata peningkatan PDRB per kapita provinsi, yaitu seluruh kota yakni Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.
2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, dan Kab. Solok Selatan.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita provinsi, yaitu Kab. Padang Pariaman.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Pasaman Barat.

#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Pengangguran**

Kualitas pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan membuka lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang. Hal ini dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.

Gambar 5.7

Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian penurunan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada gambar V-8. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

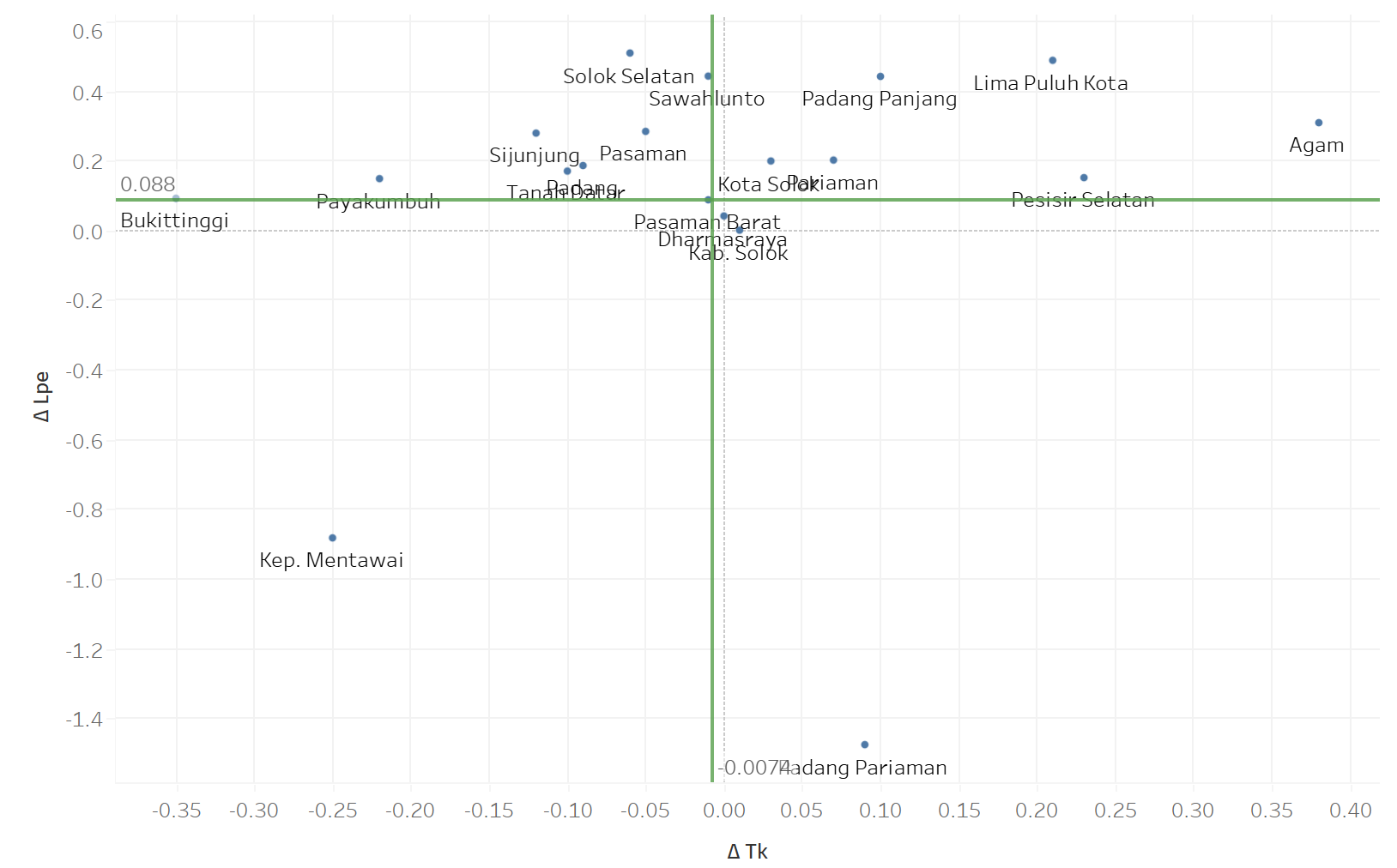
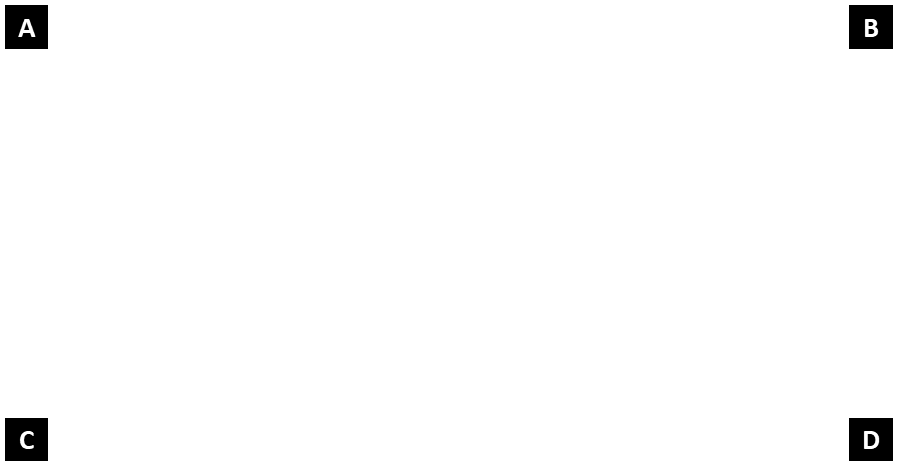
1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan TPT di atas rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh.
2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan TPT di bawah rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan TPT di atas rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Solok dan Kab. Pasaman Barat.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan TPT di bawah rata-rata penurunan TPT provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya.

#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Tingkat Kemiskinan**

Kualitas pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan membuka lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang. Hal ini dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.

Gambar 5.8

Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurutan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian penurunan tingkat kemiskinan terlihat pada gambar V-9. Posisi relatif kabupaten/kota didefinisikan sebagai berikut:

1. Kuadran A : kab/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Tingkat Kemiskinan di atas rata-rata penurunan Tingkat Kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.
2. Kuadran B : kab/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata penurunan Tingkat Kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.
3. Kuadran C : kab/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan Tingkat Kemiskinan di atas rata-rata penurunan Tingkat Kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, dan Kab. Pasaman Barat.
4. Kuadran D : ka/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata penurunan tingkat kemiskinan provinsi, yaitu Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Dharmasraya.

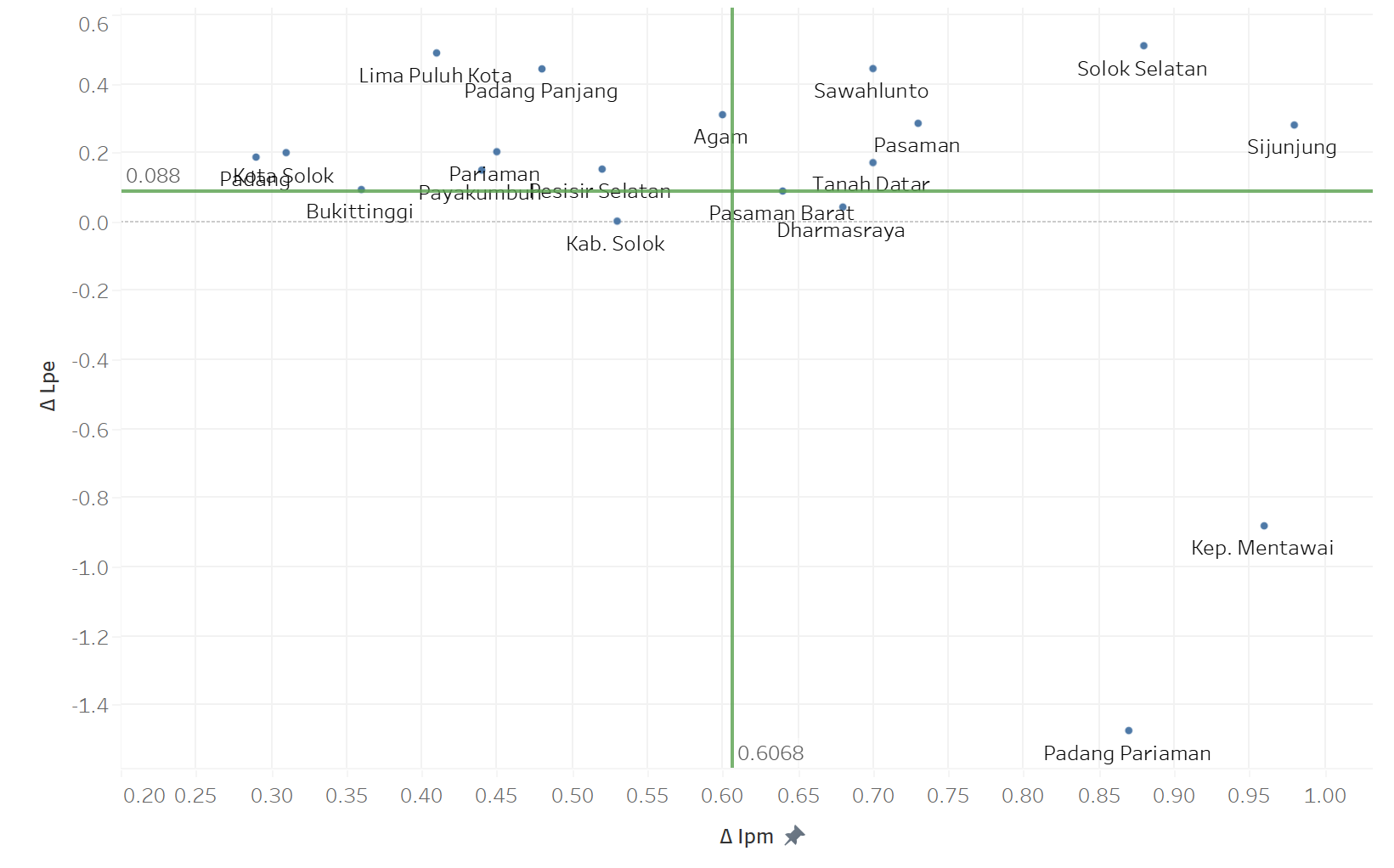
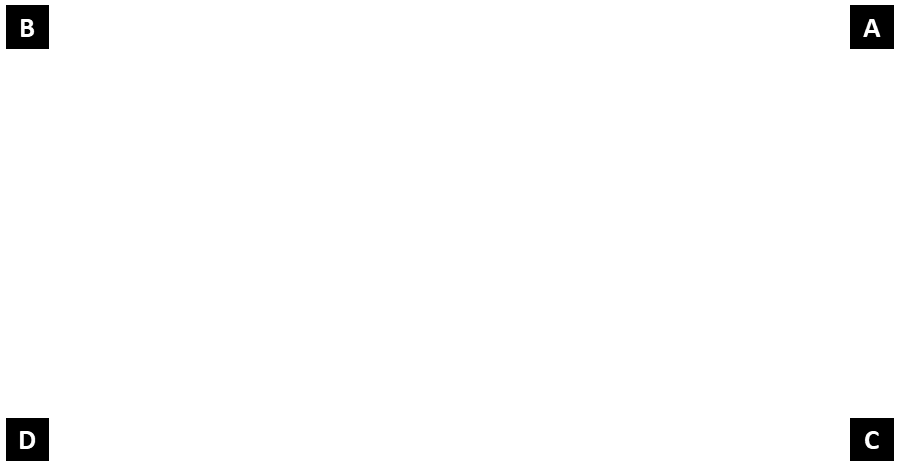
#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia**

Kualitas pertumbuhan ekonomi selain ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan juga ditunjukkan dengan peningkatan nilai IPM. Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai IPM di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.

Gambar 5.8

Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan

Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian peningkatan IPM terlihat pada gambar V-10. Posisi relatif kabupaten/kota didefinsikan sebagai berikut:

1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan peningkatan IPM di atas rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, dan Kota Sawahlunto.
2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan peningkatan IPM di atas rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Pasaman Barat.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata peningkatan IPM provinsi, yaitu Kab. Solok.

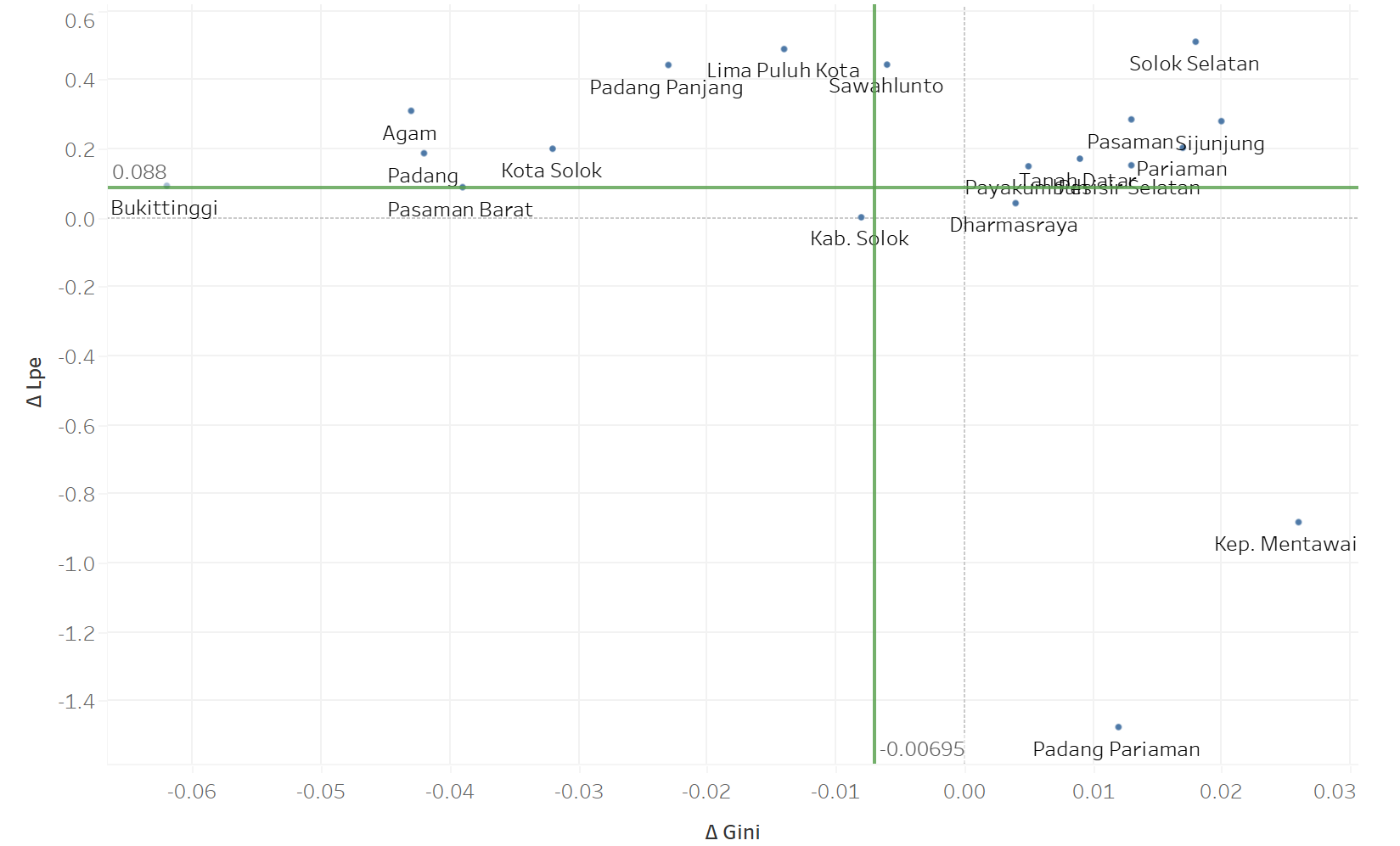
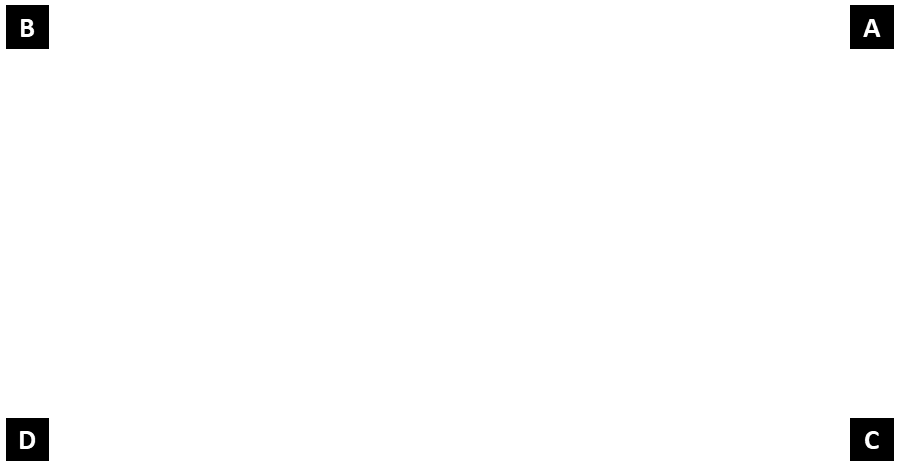
#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan**

Kualitas pertumbuhan ekonomi selain ditunjukkan dengan penurunan TPT dan tingkat kemiskinan serta peningkatan IPM juga ditunjukkan dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat perbandingan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan penurunan koefisien Gini di masing-masing kabupaten/kota. Dengan menggunakan analisis kuadran, akan terlihat posisi relatif kabupaten/kota terhadap rata-rata pencapaian provinsi.

Gambar 5.9

Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Koefisien Gini

Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2024 (data diolah)

Perbandingan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan capaian peningkatan IPM terlihat pada gambar V-11. Posisi relatif kabupaten/kota didefinsikan sebagai berikut:

1. Kuadran A : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di atas rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kab. Kep. Mentawai dan Kab. Padang Pariaman.
2. Kuadran B : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di atas LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di bawah rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi.
3. Kuadran C : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di atas rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.
4. Kuadran D : kabupaten/kota dengan pencapaian LPE di bawah LPE provinsi dan penurunan Gini Ratio di bawah rata-rata penurunan Gini Ratio provinsi, yaitu Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh.

## Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025

Target pembangunan Provinsi Sumatera Barat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dilakukan sendiri maupun bersinergi dengan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat dan dunia usaha. Kinerja pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat selain diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), juga diukur dengan pencapaian Indikator Kinerja Makro. Target indikator makro yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 adalah target berdasarkan hasil analisis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan penyesuaian target pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi dan transformasi struktural untuk indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, IPM, jumlah dan persentase Penduduk Miskin, TPT, dan Indeks Gini.

Dalam mewujudkan sinergi perencanaan provinsi dan kabupaten/kota dimaksud, maka ditetapkan arahan target indikator kinerja makro tahun 2025 bagi setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada Tabel 5.1 menyajikan proyeksi target indikator makro kabupaten/kota yang mendukung pencapaian target Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya pada Tabel 5.2 menyajikan proyeksi target indikator komponen pembentuk IPM untuk seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 5.1

Proyeksi Indikator Makro Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024-2025

| No. | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan Ekonomi  (%) | | PDRB ADHK per Kapita  (Rp. Juta) | | PDRB ADHB per Kapita  (Rp. Juta) | | IPM | | Jumlah Penduduk Miskin  (ribu jiwa) | | Tingkat Kemiskinan  (%) | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | Indeks Gini | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 4,73 | 4,85 | 37,57 | 39,12 | 70,20 | 77,32 | 66,90 | 67,81 | 13,70 | 13,38 | 13,22 | 12,74 | 1,33 | 1,39 | 0,227 | 0,226 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 4,85 | 4,87 | 20,91 | 21,55 | 37,41 | 40,41 | 72,74 | 73,25 | 34,70 | 33,90 | 7,10 | 6,88 | 4,63 | 4,59 | 0,243 | 0,242 |
| 3 | Kab. Solok | 4,63 | 4,73 | 28,23 | 29,19 | 44,69 | 47,66 | 72,45 | 73,01 | 26,44 | 25,83 | 6,68 | 6,31 | 4,77 | 4,67 | 0,240 | 0,238 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 4,77 | 4,84 | 31,42 | 32,59 | 49,38 | 52,74 | 73,15 | 73,98 | 15,36 | 15,00 | 5,66 | 5,36 | 4,58 | 4,49 | 0,240 | 0,239 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 4,62 | 4,72 | 29,27 | 30,30 | 45,48 | 48,48 | 76,67 | 77,51 | 14,76 | 14,42 | 3,89 | 3,68 | 5,12 | 5,09 | 0,243 | 0,242 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 5,03 | 5,07 | 32,24 | 33,53 | 60,06 | 64,16 | 75,64 | 76,47 | 26,57 | 25,95 | 6,03 | 5,73 | 6,59 | 6,62 | 0,245 | 0,244 |
| 7 | Kab. Agam | 4,82 | 4,89 | 30,59 | 31,58 | 50,40 | 53,77 | 75,21 | 75,81 | 31,34 | 30,61 | 6,26 | 6,19 | 4,84 | 4,93 | 0,294 | 0,293 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 4,78 | 4,87 | 32,68 | 34,02 | 53,12 | 57,11 | 72,18 | 72,60 | 25,53 | 24,94 | 6,52 | 6,25 | 3,82 | 3,63 | 0,206 | 0,205 |
| 9 | Kab. Pasaman | 4,82 | 4,88 | 22,69 | 23,38 | 38,67 | 41,53 | 70,44 | 71,06 | 20,23 | 19,76 | 6,39 | 6,01 | 4,90 | 5,51 | 0,223 | 0,222 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 4,81 | 4,85 | 23,47 | 24,09 | 38,39 | 40,59 | 72,77 | 73,38 | 11,95 | 11,67 | 6,06 | 5,70 | 2,56 | 3,22 | 0,248 | 0,247 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 4,89 | 4,96 | 35,90 | 37,39 | 57,72 | 62,20 | 74,47 | 75,02 | 15,78 | 15,41 | 5,14 | 4,77 | 6,05 | 5,59 | 0,286 | 0,285 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 4,91 | 5,02 | 28,97 | 30,11 | 44,93 | 48,35 | 72,05 | 72,80 | 33,73 | 32,95 | 6,71 | 6,50 | 5,74 | 4,92 | 0,276 | 0,275 |
| 13 | Kota Padang | 5,33 | 5,35 | 55,13 | 57,89 | 92,04 | 99,95 | 84,74 | 85,18 | 43,47 | 42,46 | 4,05 | 3,92 | 10,16 | 9,12 | 0,352 | 0,351 |
| 14 | Kota Solok | 5,03 | 5,07 | 42,77 | 44,14 | 71,24 | 76,13 | 80,06 | 80,35 | 2,20 | 2,15 | 2,73 | 2,43 | 3,64 | 3,75 | 0,286 | 0,285 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 5,09 | 5,11 | 47,16 | 48,91 | 77,66 | 84,13 | 76,34 | 76,96 | 1,43 | 1,39 | 2,28 | 2,28 | 4,81 | 4,36 | 0,314 | 0,313 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 5,15 | 5,16 | 50,49 | 52,20 | 80,34 | 85,74 | 80,01 | 80,43 | 2,92 | 2,85 | 5,03 | 4,85 | 5,35 | 3,94 | 0,297 | 0,296 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 5,27 | 5,28 | 57,53 | 60,54 | 96,47 | 105,24 | 82,39 | 82,83 | 6,29 | 6,14 | 3,76 | 3,73 | 4,75 | 4,93 | 0,315 | 0,314 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 5,29 | 5,30 | 35,55 | 36,86 | 67,36 | 72,96 | 80,55 | 80,95 | 8,39 | 8,20 | 5,05 | 4,67 | 4,64 | 4,44 | 0,309 | 0,308 |
| 19 | Kota Pariaman | 5,14 | 5,16 | 42,03 | 43,41 | 69,01 | 73,59 | 80,27 | 80,88 | 3,85 | 3,76 | 4,10 | 3,99 | 5,37 | 4,70 | 0,271 | 0,270 |
|  | **SUMATERA BARAT** | **5,00** | **5,05** | **34,75** | **36,10** | **57,94** | **62,29** | **76,67** | **77,41** | **338,70** | **330,84** | **5,83** | **5,65** | **5,75** | **5,55** | **0,291** | **0,290** |

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Tabel 5.2

Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024-2025 dan Komponen Pembentuknya

| No. | Kabupaten/Kota | IPM | | Usia Harapan Hidup | | Harapan Lama Sekolah | | Rata-Rata Lama Sekolah | | Pengeluaran per Kapita | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 66,90 | 67,81 | 71,37 | 72,08 | 13,15 | 13,37 | 7,90 | 8,05 | 6.992 | 7.096 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 72,74 | 73,25 | 73,61 | 73,98 | 13,36 | 13,45 | 8,66 | 8,74 | 10.099 | 10.250 |
| 3 | Kab. Solok | 72,45 | 73,01 | 72,50 | 73,01 | 13,63 | 13,74 | 7,99 | 8,05 | 10.874 | 11.037 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 73,15 | 73,98 | 72,72 | 73,44 | 12,83 | 12,94 | 8,69 | 8,88 | 11.179 | 11.346 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 76,67 | 77,51 | 74,42 | 74,91 | 15,20 | 15,40 | 9,11 | 9,23 | 11.065 | 11.230 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 75,64 | 76,47 | 74,19 | 74,75 | 14,34 | 14,48 | 8,59 | 8,78 | 11.600 | 11.773 |
| 7 | Kab. Agam | 75,21 | 75,81 | 74,47 | 74,80 | 14,04 | 14,18 | 9,34 | 9,47 | 10.554 | 10.712 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 72,18 | 72,60 | 73,12 | 73,50 | 13,44 | 13,46 | 8,16 | 8,20 | 10.436 | 10.592 |
| 9 | Kab. Pasaman | 70,44 | 71,06 | 72,17 | 72,74 | 13,37 | 13,49 | 8,21 | 8,28 | 9.039 | 9.174 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 72,77 | 73,38 | 72,35 | 72,92 | 12,89 | 12,98 | 8,76 | 8,85 | 11.043 | 11.208 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 74,47 | 75,02 | 74,16 | 74,56 | 12,82 | 12,94 | 8,78 | 8,86 | 12.075 | 12.256 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 72,05 | 72,80 | 72,28 | 72,79 | 13,71 | 13,72 | 8,70 | 8,81 | 9.678 | 9.822 |
| 13 | Kota Padang | 84,74 | 85,18 | 74,80 | 74,91 | 17,26 | 17,48 | 11,65 | 11,68 | 15.310 | 15.539 |
| 14 | Kota Solok | 80,06 | 80,35 | 74,82 | 75,07 | 14,43 | 14,47 | 11,45 | 11,48 | 12.895 | 13.088 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 76,34 | 76,96 | 73,71 | 74,04 | 13,89 | 13,86 | 10,56 | 10,67 | 10.988 | 11.152 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 80,01 | 80,43 | 74,15 | 74,27 | 15,37 | 15,46 | 12,04 | 12,14 | 11.476 | 11.647 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 82,39 | 82,83 | 75,64 | 75,95 | 15,03 | 15,04 | 11,76 | 11,85 | 14.062 | 14.272 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 80,55 | 80,95 | 74,95 | 75,15 | 14,31 | 14,32 | 11,04 | 11,15 | 14.183 | 14.395 |
| 19 | Kota Pariaman | 80,27 | 80,88 | 74,19 | 74,54 | 14,86 | 14,93 | 10,96 | 11,09 | 13.551 | 13.753 |
|  | **SUMATERA BARAT** | **76,67** | **77,41** | **74,22** | **74,79** | **14,12** | **14,13** | **9,37** | **9,47** | **11.547** | **11.719** |

Sumber: Hasil Analisis (2024)

1. **Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

Kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2025. Kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan prioritas, sasaran serta arah kebijakan pembangunan tahunan RPJMD pada tahun 2025, dan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan antar daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan provinsi Tahun 2025, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas kemajuan pembangunan antar daerah, baik pada aspek sumberdaya manusia maupun aspek sosial ekonomi. Adapun arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

1. **Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi**

Merujuk kepada tema RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang tetap fokus pada menekankan pada transformasi sektor strategis dengan tetap meperhatikan pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan maka kebijakan pembangunan ekonomi menyasar pada sektor ekonomi strategis sesuai dengan program unggulan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yaitu pertanian, wirausaha dan usaha kecil menengah, serta pariwisata yang bertransformasi dari sektor primer ke sekunder dan tersier..

Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi ditahun 2025 diharapkan memberikan dampak yang signifkan pada peningkatan PDRB Per kapita, penurunan tingkat kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi juga mulai disasar pada Sektor Jasa yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah tinggi seperti sektor pariwisata, jasa pendidikan serta jasa keuangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap berfokus pada penurunan angka kemiskinan terutama melalui pengembangan sektor pertanian yang terpadu, hal ini mengingat kantong kemisinan dominan berada pada daerah perdesaan yang sebagian besar pada sektor pertanian, selain itu penurunan angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan baru di berbagai sektor ekonomi khususnya di perkotaan dengan upaya pembinaan dan kemudahan akses keuangan untuk menurunkan angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sementara itu secara umum sektor pariwisata khususnya wisata kuliner dan pemantaban Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

* 1. Kabupaten-kabupaten diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pertanian baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis pertanian secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
     1. Pengimplementasikan skema *corporate farming* bisa menjadi pilihan yang pada prinsipnya hampir sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak begitu terlihat lagi perannya. Bentuk lain yang mungkin jadi pilihan adalah penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai motor bagi masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar di pasar pangan yang didominasi oleh tengkulak.
     2. Perlunya implementasi pertanian organik pada kawasan sentra pertanian dan pemanfaatan hasil pertanian organik.
     3. Gerakan untuk mengajak generasi muda untuk bertani bisa juga menjadi pillihan lain dengan fakta adanya bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak berusia muda dengan *median age* 31 tahun.
     4. Sektor pariwisata di perdesaan juga bisa berkembang dengan mengawinkan kegiatan bertani dengan pengalaman wisata melalui pengembangan desa wisata di berbagai tempat. Selain itu pemanfaatan kawasan hutan produksi dengan mekanisme perhutanan sosial dapat juga menjadi alternatif skema *ecowisata* di kawasan perhutanan sosial.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

* 1. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor industri dan perdagangan baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
     1. Peningkatan standar mutu komoditas potensial dan diversifikasi komoditas perdagangan terutama komoditas ekspor. Hal ini perlu ditunjang dengan perluasan implementasi digitalisasi perdagangan melalui penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar digital.
     2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM serta penguatan SDM bagi pelaku IKM dan UMKM pada komoditas potensial. Hal ini perlu ditunjang oleh fasilitasi kemudahan investasi bagi investor lokal, nasional, maupun investor luar negeri.
     3. Penumbuhan wirausaha terutama wirausaha muda dan woman enterpreneur untuk dapat membuka lapangan usaha di komoditas potensial di sektor-sektor strategis.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Pasaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

* 1. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dengan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pariwisata baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
     1. Membangun dan mengembangan industri pariwisata halal dengan peningkatan kualitas destinasi yang memenuhi aspek amenitas, aksesibilitas, dan atraksi dengan penekanan pada manajemen pengelolaan destinasi yang bertumpu pada komunitas seperti desa wisata.
     2. Meningkatkan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
     3. Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi Informasi serta memperkuat kemitraan Hexahelix.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan semua daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi.

1. **Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan**

Dalam jangka panjang dan menengah, sasaran yang ingin dicapai di bidang kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan salah satu arah kebijakan nasional adalah “Peningkatan Kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan”, dimana bidang kesehatan ditekankan pada Sistem Kesehatan dengan indikator terkait prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 14% , Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk.dan Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%. Untuk Tahun 2025 terdapat dukungan *major project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah didentifikasi isu terkait pada bidang kesehatan diantaranya peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan, relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat, dan pentingnya pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat. Yang tak kalah pentingnya adalah permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*Stunting*).

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, difokuskan pada upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan antara lain:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing.
3. Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan SDM kesehatan
4. Penurunan angka prevalansi stunting dan pelaksanaan aksi konvergensi.
5. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.
6. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif melalui GERMAS.

Arah kebijakan yang diambil untuk melaksanakan prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan IPM kabupaten yang capaian indeks kesehatannya masih rendah, khususnya diarahkan bagi kabupaten/kota yang memiliki Angka Harapan Hidup (UHH) yang masih dibawah rata-rata Provinsi. Daerah tersebut menjadi prioritas dilakukannya peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan partisipasi masyarakat akan kesehatan. Sementara itu bagi daerah yang sudah AHH yang relatif baik terus didorong untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang menyeluruh dan berdaya saing melalui penyedian sarana, prasarana dan SDM pendukung, juga memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan berfokus pada penanganan pandemi yang masih berlangsug. Secara umum, poin arah kebijakan kesehatan sebagaimana tersebut diatas perlu menjadi perhatian bersama seluruh Kabupaten/Kota.

Khusus terkait percepatan penanganan stunting sangat perlu diprioritaskan seluruh daerah, karena seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah menjadi daerah lokus stunting sejak Tahun 2022. Prevalansi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan manusia. Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program. Percepatan penurunan stunting perlu diupayakan dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, sehingga target nasional Tahun 2025 sebesar 14 % diharapkan bisa dicapai bersama juga di tingkat daerah di Sumatera Barat.

1. **Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan**

Kebijakan nasional terkait pembangunan bidang pendidikan salah satu prioritas pembangunannya adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan nasional dalam mendukung prioritas dimaksud adalah dengan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 maka salah satu arah kebijakan nasional adalah “Peningkatan Kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan”, dimana pendidikan ditekankan pada Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter, dengan dukungan major project terkait Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0).

Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah didentifikasi isu terkait dimana peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Sumatera Barat. Selain itu, adopsi kebijakan merdeka belajar juga menjadi penting untuk menghadirkan pendidikan bermutu tinggi, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata. Dimana Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat. Kemudian, penting diperhatikan terkait meningkatnya kebutuhan lulusan pendidikan menengah yang terampil dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan di daerah .

Kebijakan pembangunan bidang pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025, difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan arah kebijakan antara lain:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
2. Pemerataan akses pendidikan bagi semua baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.
3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui adopsi kebijakan merdeka belajar yang berpihak pada kebutuhan anak/siswa.
4. Pembangunan sarana prasarana pendukung pendidikan yang diarahkan untuk mendukung pembelajaran pasca pandemi, seperti sanitasi yang layak di sekolah, dukungan akses teknologi informasi yang memadai, dan lainnya.
5. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pendistribusian tenaga pendidik di semua daerah.
6. Pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah, dan relevan dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja.
7. Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan peningkatan literasi masyarakat.

Arah kebijakan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan IPM kabupaten/kota yang capaian komponen pendidikannya masih rendah di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan untuk seluruh kabupaten di Sumatera Barat yang juga memiliki capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten tersebut menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas dan layanan pendidikan terutama dalam membangun ruang kelas baru, peningkatan akses dan jangkauan pendidikan, serta penyediaan tenaga pendidikan secara kuantitas dan kualitas. Sementara itu bagi daerah yang sudah memiliki RLS dan HLS yang relatif baik terus didorong untuk meningkatkan daya saing melalui pelayanan pendidikan secara efisien dan merata. Adopsi kebijakan merdeka belajar dan pengembangan pendidikan karakter juga harus terus didorong dalam proses peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di ruang kelas.

Selanjutnya, daerah dengan TPT yang masih tinggi perlu didorong untuk terus melakukan penguatan pendidikan vokasi melalui upaya kerjasama dan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia industri yang bisa meningkatkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

1. **Arah Kebijakan Pemerataan Wilayah**

Salah satu Prioritas Nasional dalam jangka menengah dan panjang adalah “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”. Prioritas ini dapat diukur salah satunya dengan Indeks Williamson. Kondisi pandemi COVID-2019 di sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memperlebar ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Indeks Williamson yang pada tahun 2019 menunjukkan angka 0,274 naik tajam menjadi 0,321 di tahun 2023. Kota Padang menjadi daerah yang dominan dalam menyumbang ketimpangan Sumatera Barat, naik dari 45,42% pada tahun 2010 menjadi 54,53% pada tahun 2023. Nilai PDRB per kapita Kota Padang yang jauh di atas rata-rata provinsi membuat tingkat ketimpangan wilayah di Sumatera Barat meningkat tajam. Di sisi lain Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah penyangga Kota Padang justru memiliki nilai PDRB per kapita yang jauh di bawah rata-rata provinsi. Hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat.

Gambar 5.10

Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Secara visual ketimpangan antar wilayah terlihat dari Gambar V-13 yang secara jelas menunjukkan posisi relatif Kota Padang yang jauh berbeda dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan secara *gradual* perkembangan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Barat mengarah kepada pembentukan Kota Padang sebagai *Primate City*. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian dalam kerangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah.

Grafik 5.1

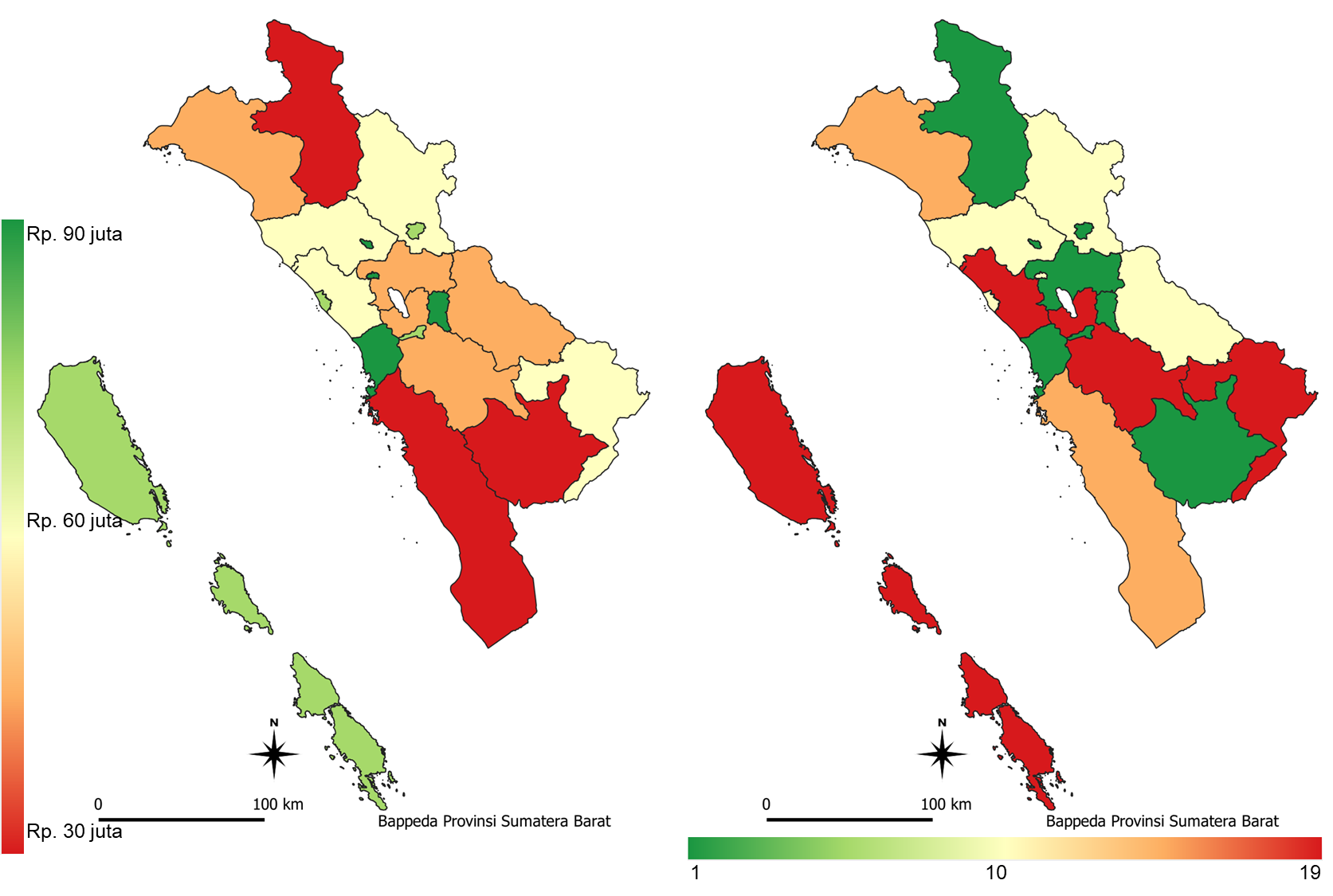
Kontribusi Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah dibandingkan denan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2023

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)

Ketimpangan pendapatan secara wilayah ini perlu disandingkan dengan hasil pencapaian kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kabupaten/kota tahun 2023. Kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2023 terlihat pada gambar V-14 dimana warna hijau menunjukan daerah dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan relatif tinggi dan sebaliknya warna merah menunjukkan daerah dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan relatif rendah.

Gambar 5.11

Peta Perbandingan PDRB per Kapita dan Persebaran Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Hasil Analisis (2024)

Kualitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2023 ditunjukkan pada Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh dengan Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Pasaman Barat berada satu level di bawahnya. Sementara itu daerah lain yang di tahun 2021 menunjukkan kualitas pertumbuhan yang baik, pada tahun 2023 cenderung mengalami kontraksi seperti Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Dharmasraya.

Penurunan kesenjangan antarwilayah salah satunya dapat diatasi dengan memberikan stimulus penggerak ekonomi daerah melalui pembangunan jalan yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah ke pusat-pusat kegiatan lokal maupun wilayah. Secara teoritis semakin tinggi aksesibilitas suatu wilayah, maka semakin tinggi kecenderungan aktivitas ekonomi untuk bergerak di sepanjang koridor jalan yang dibangun. Hal ini juga cenderung akan merubah pola penggunaan lahan disepanjang jaringan jalan yang dibangun. Pola pembangunan tersebut dapat mengadopsi pola pertumbuhan berdasarkan koridor atau *corridor development*.

Koridor pertumbuhan bukanlah merupakan hal yang baru. Konsep ini sudah lama berkembang dan telah diimplementasikan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dilanjutkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Konsep ini juga diadaptasi secara regional dalam dokumen Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat (MP3ESB). Pertumbuhan ekonomi daerah bertumpu di sepanjang koridor pertumbuhan dan diharapkan memiliki *trickle-down effect* ke wilayah di sekitarnya (*hinterland*).

Gambar 5.12

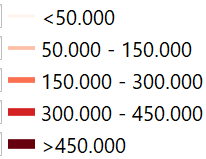
Pola Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Koridor Pertumbuhan di Pulau Sumatera dan Provinsi Sumatera Barat

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Sumber: RPJMN 2020-2024, MP3ESB

Merujuk kepada koridor pertumbuhan dalam RPJMN 2020-2024 dan dokumen MP3ESB, maka koridor pertumbuhan utama di Sumatera Barat bertumpu pada koridor pertumbuhan Padang – Bukittinggi – Payakumbuh – Batas Riau. Adapun wilayah yang terdelineasi antara lain Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Pertumbuhan pada koridor ini diharapkan dapat mengalir ke wilayah sekitarnya untuk mewujudkan pemerataan wilayah. Pemerataan ini dapat dilakukan dengan penyediaan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

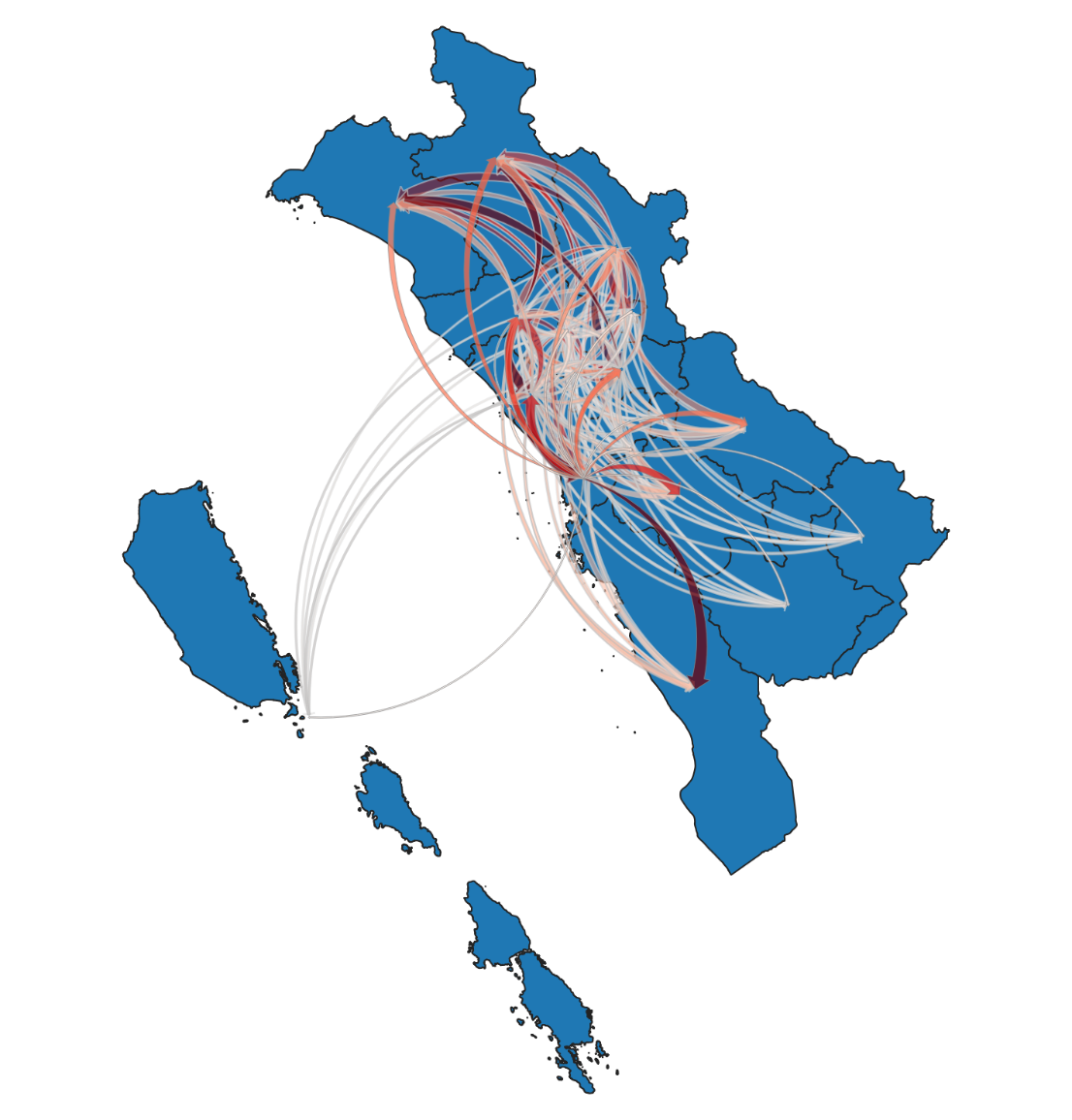
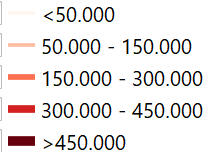
Untuk bisa melakukan intervensi penyediaan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dapat dilihat dari pola pergerakan orang dan barang antar wilayah. Berdasarkan data Matriks Asal Tujuan (MAT) pergerakan dari setiap wilayah di koridor pertumbuhan ke wilayah lain di Sumatera Barat ditumpangtindihkan dengan data kondisi ruas jalan provinsi dengan kondisi mantap serta tingkat kualitas pelayanan jalan, maka dapat diperoleh ruas-ruas jalan yang memang perlu diintervensi untuk mengakselerasi *trickle-down effect* dari koridor pertumbuhan ke wilayah *hinterland*.



Gambar 5.13

Pola Pergerakan dari Koridor Pertumbuhan ke Wilayah lain

di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Hasil Analisis (2024)

Beberapa ruas jalan yang perlu didorong pembangunannya untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan pemerataan pembangunan wilayah adalah:

* 1. Ruas jalan Kubu Kerambil - Batu Sangkar (Kab. Tanah Datar)
  2. Ruas jalan Sicincin - Kurai Taji (Kab. Padang Pariaman)
  3. Ruas jalan Baso - Piladang (Kab. Agam)
  4. Ruas jalan Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (Kab. Lima Puluh Kota)
  5. Ruas jalan Simpang Napal - Bukit Tual - Tanjung Ampalu (Kab. Sijunjung)
  6. Ruas jalan Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur (Kab. Lima Puluh Kota)
  7. Ruas jalan Tapus (Kab. Pasaman) - Muaro Sei Lolo – Gelugur (Kab. Lima Puluh Kota)
  8. Ruas jalan Lubuk Sikaping (Kab. Pasaman) – Talu (Kab. Pasaman Barat)
  9. Ruas jalan Alahan Panjang (Kab. Solok) - Kiliran Jao (Kab. Sijunjung)
  10. Ruas jalan Abai Sangir (Kab. Solok Selatan) - Sungai Dareh (Kab. Dharmasraya)
  11. Ruas jalan Lubuk Malako - Abai Sangir (Kab. Solok Selatan)

1. **Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain**

Wilayah perbatasan ditandai dengan karakteristik keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi, pasar, serta energi. Keterbatasan ini juga dipersulit dengan pola penyebaran lokasi permukiman yang relative jauh sehingga sulit menyediakan sarana dan prasarana yang efektif, efisien, terintegrasi dan berkualitas.

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah timur, dengan Provinsi Bengkulu sebelah Selatan, dan dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3

Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan di Kawasan Perbatasan

dengan Provinsi Tetangga

| No. | Provinsi Berbatasan | Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kecamatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sumatera Utara | Pasaman Barat | 4 | Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh dan Lembah Malintang |
| Pasaman | 4 | Duo Koto, Rao Utara, Rao, Mapat Tunggul |
| 2 | Riau | Pasaman | 2 | Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan |
| Lima Puluh Kota | 4 | Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Harau, Lareh Sago Halaban |
| Sijunjung | 3 | Sijunjung, Kamang Baru, Sumpur Kudus |
| Dharmasraya | 2 | Sitiung dan Koto Baru |
| 3 | Jambi | Dharmasraya | 2 | Koto Baru, Sungai Rumbai |
| Solok Selatan | 2 | Sangir Jujuhan dan Sangir |
| Pesisir Selatan | 3 | Pancung Soal, basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut |
| 4 | Bengkulu | Pesisir Selatan | 1 | Lunang Silaut |

Arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi ekonomi unggulan berupa sumberdaya alam, wisata dan sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola meningkatkan kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.
2. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
3. Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.
4. Peningkatan sumberdaya manusia dalam upaya transfer knowledge.
5. Penyusunan dan implementasi regulasi mendukung pengembangan daerah perbatasan.
6. Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
7. Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas program atau kegiatan antar wilayah perbatasan untuk percepatan pengembangan Kawasan.